



PENGEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BERAU BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

HJ. Syarifatul Sya'diah. S.Pd., M.Si.

Ketua DPRD Berau (Alumnus P3DA 10)

Abstrak

Dalam Pencapaian pembangunan dan pengembangan ekonomi, keberagaman harus dimaknai dengan semangat dan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan perlu selalu dipahami dan dijiwai oleh setiap insan pribadi bangsa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini yang menjadi persoalan, bagaimana nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat menjiwai pengembangan ekonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Berau? Salah satunya terkait isu batas wilayah, yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat, baik yang merupakan perbatasan antar kabupaten hingga perbatasan antardesa. Selain persoalan mengenai perbatasan, Kab. Berau juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan agraria. Pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan mengeliminasi semangat dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Katakunci: pengembangan ekonomi, nilai-nilai kebangsaan, kesejahteraan rakyat



PENDAHULUAN

Keberagaman sudah menjadi sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman saat dikelola dan dijiwai sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, akan selalu bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sebaliknya, keberagaman yang dimaknai secara apa adanya tanpa dilandasi oleh semangat dan nilai kebangsaan hanya akan menjadi sebuah alasan timbulnya konflik dan perpecahan.

Hal inilah yang membuat nilai-nilai kebangsaan perlu selalu dipahami dan dijiwai oleh setiap insan pribadi bangsa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan sendiri pada hakekatnya merupakan suatu pandangan atau cara pandang yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, mengedepankan persatuan dan kesatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, di mana semangat tersebut dituangkan dalam upaya bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik yang tercermin pada terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata.

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), nilai kebangsaan tercerminkan pada (1) Persatuan Bangsa, di mana muncul rasa kebersamaan yang semakin mempererat kohesivitas dalam masyarakat sebagai satu bangsa. Hal ini dapat diukur keberhasilannya melalui intensitas komunikasi sosial antar komponen bangsa yang beragam. (2) Kesatuan Wilayah, yang merupakan kesadaran ruang hidup dari segenap komponen masyarakat Indonesia yang menyadari betapa pentingnya kesatuan wilayah demi mengembangkan kehidupan bersama sebagai satu bangsa. (3) Kemandirian, sejarah panjang bangsa Indonesia telah mengajarkan kita bagaimana anak bangsa bisa bekerja sama bahu membahu mencapai tujuan dalam semangat senasib sepenanggungan. Semangat untuk secara mandiri dan berdaulat mengupayakan tujuan dan cita-cita inilah yang perlu senantiasa digelorakan dalam tiap pribadi warga bangsa.

Kini yang menjadi persoalan, bagaimana nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat menjiwai pengembangan ekonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Berau?

PEMBAHASAN

a. Menghindari Konflik dan Menuntaskan Isu Perbatasan

Salah satu keunggulan yang dimiliki Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Berau adalah kondisi sosial masyarakat yang plural dan majemuk seperti miniatur Indonesia. Secara umum masyarakatnya memiliki budaya terbuka sehingga di wilayah ini hampir tidak pernah terjadi konflik sosial baik yang bernuansa SARA, maupun terkait persoalan sosial lainnya. Keterbukaan terhadap pendatang dan kemauan masyarakat untuk saling menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lain, menjadi sebuah kekuatan yang sangat berguna bagi kemajuan pembangunan daerah Berau.

Meski demikian, kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif perlu terus dijaga. Pemerintah daerah beserta instansi terkait dituntut aktif memetakan dan mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul yang bisa menjadi penyebab konflik. Salah satunya terkait isu batas wilayah, yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat, baik yang merupakan perbatasan antar kabupaten hingga perbatasan antardesa.

Sekalipun isu perbatasan ini tidak sampai menimbulkan konflik sosial seperti yang banyak terjadi di daerah lain, namun sengketa batas wilayah membuat pembangunan di wilayah perbatasan menjadi tidak optimal karena rancunya persoalan administrasi dan kewenangan pembangunan. Hal tersebut pada akhirnya akan menjadi hambatan terkait upaya pemerataan pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Berau memiliki sengketa

batas wilayah dengan Kabupaten Bulungan. Batas wilayah Kabupaten Sekaligus Provinsi antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini sudah mengemuka sejak tahun 2012. Meskipun kedua belah pihak sudah berulang kali duduk bersama, namun baru enam titik lokasi yang berhasil disepakati, masih ada sejumlah batas wilayah yang menemukan titik temu. Persoalan ini pun kini diserahkan ke pemerintah pusat dalam ini Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan batas-batasnya.

Selain dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau juga masih berpolemik tapal batas dengan Kabupaten Kutai Timur. Hingga kini proses perundingan baru berhasil menyepakati 300 km² lahan yang disengketakan kedua belah pihak, sementara 200 km² sisanya masih menemui jalan buntu. Persoalan ini pun kini diserahkan kepada Pemprov Kalimantan Timur untuk diselesaikan.

Dalam internal wilayah Kabupaten Berau sendiri, Pemkab juga dihadapkan untuk segera menyelesaikan persoalan terkait sejumlah batas antar kampung. Belum adanya kesepakatan dan kejelasan mengenai perbatasan antar kampung mengakibatkan beberapa kebijakan pembangunan dan administrasi menjadi sulit dilakukan di sejumlah perbatasan kampung. Untuk itu, Pemkab Berau telah menargetkan untuk bisa menyelesaikan batas kampung di seluruh wilayahnya hingga tahun 2021.

Selain persoalan mengenai perbatasan, Kab. Berau juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan agraria. Banyaknya status lahan yang tidak jelas legalitasnya, kerap menjadi persoalan yang bisa mengancam persatuan dan kerukunan masyarakat. Tidak jarang muncul kasus fasilitas umum seperti sekolah yang baru selesai dibangun, digembok dan disegel oleh masyarakat yang mengaku pemilik lahan. Hal ini bisa terjadi karena bukan hanya



lahan masyarakat yang belum bersertifikat, namun ironisnya, sebagian aset pemerintah pun belum bersertifikat.

Persoalan agraria khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat, pada umumnya bisa diselesaikan saat semua pihak dapat duduk bersama. Hal ini dikarenakan, masyarakat Berau pada umumnya memiliki kesadaran untuk lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Masyarakat Berau umumnya hanya minta diajak bermusyawarah jika memang ada rencana pemanfaatan lahan yang diklaim milik masyarakat untuk kepentingan umum. Meski begitu, persoalan agraria memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemda agar persoalan yang lebih besar tidak terjadi di kemudian hari.

Pada sisi lain, langkah proaktif dari para pemuka masyarakat termasuk mereka yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Berau juga ikut memberikan andil terciptanya stabilitas sosial di tengah masyarakat. Secara rutin, FKUB menggelar pertemuan setiap bulannya untuk melihat, menganalisa dan mengambil sikap untuk mengantisipasi berbagai potensi yang dapat memicu terjadinya konflik di Berau.

Lingkup pembahasannya pun terkadang tidak hanya terbatas pada potensi konflik yang bersumber dari persoalan SARA, namun juga hal-hal yang bersifat umum namun aktual seperti maraknya demo karyawan perusahaan pertambangan yang di Kabupaten Berau saat ini kerap terjadi.

Upaya FKUB dalam membantu pemerintah dan aparat keamanan untuk memetakan dan mengantisipasi konflik perlu terus dilakukan guna mewujudkan terciptanya persatuan antar umat beragama di Berau. Terlebih Kabupaten Berau saat ini tengah bersiap melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Tahun

politik tersebut agaknya perlu diantisipasi agar tidak ada oknum yang mencari kepentingan dengan penyebaran isu SARA yang memecah belah masyarakat.

b. Maju Bersama dalam Bingkai Kemandirian

Nilai Kebangsaan dalam koridor pembangunan agaknya tidak hanya perlu ditanamkan dalam bentuk persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, namun juga pada kemandirian. Dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, selain menjaga terwujudnya kestabilan sosial politik di daerah, pembangunan juga harus diarahkan pada terciptanya kemandirian baik itu dalam lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pada akhirnya dalam lingkup negara.

Kabupaten Berau sebenarnya merupakan daerah yang tergolong beruntung karena dikaruniai Allah SWT dengan sumber kekayaan alam yang luar biasa besar. Oleh sebab itu, kekayaan alam tersebut sudah seharusnya dapat dimaksimalkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selama ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau banyak ditopang oleh sektor pertambangan batubara. Menurut data BPS, pada tahun 2017 Kabupaten Berau mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp 1,69 triliun atau mencangkup 87,1 persen dari total pendapatan daerah. Meski demikian, perekonomian Berau juga sempat mengalami kontraksi dan tumbuh -1,7% akibat anjloknya permintaan dan harga komoditas batubara. Hal ini tentu menjadi lampu kuning bagi Pemkab untuk tidak terlalu bergantung pada sektor batubara dan terus berupaya memacu sektor-sektor usaha lain di Berau.

Salah satu upaya Pemkab Berau dalam turut mendorong sektor perekonomian lain sekaligus sebagai upaya pemeratakan pembangunan di wilayahnya adalah menggulirkan pembangunan desa/

kampung. Alokasi bantuan sebesar Rp 2 miliar tiap kampung guna mendukung program pemerintah pusat yang juga telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 800 juta per kampung, menjadi bukti keperpihkan Pemda terhadap pembangunan desa.

Upaya tersebut dapat dikatakan cukup berhasil. Besarnya alokasi dana yang dikururkan ke kampung oleh pemerintah daerah mendorong munculnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang memacu masyarakat desa untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi baik yang berasal dari alam maupun beragam bentuk ekonomi kreatif sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat kampung.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, Pemkab Berau berhasil meningkatkan status mayoritas kampung-kampung yang ada di Berau. Menurut data yang dimiliki Pemkab Berau, pada tahun 2018, sudah tidak ada lagi status kampung sangat tertinggal. Pemkab sendiri optimis bahwa status kampung tertinggal bisa dihapuskan pada tahun 2019 ini. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa mengingat pada tahun 2016, sekitar 70% kampung di Berau masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Sejumlah pencapaian yang terjadi di Kabupaten Berau tentu tidak mungkin dapat terwujud jika Pemerintah Daerah beserta seluruh *stakeholder* dan masyarakat tidak berpijak pada nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI yaitu Persatuan Bangsa, Kesatuan Wilayah dan Kemandirian. Kesadaran untuk bersatu dan bekerja sama, memberikan sumbangsih terbaik bagi kemaslahatan masyarakat luas, ditunjang pada kesadaran terhadap kesatuan wilayah dan berupaya untuk memaksimalkan semua potensi yang ada agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk secara mandiri, merupakan sebagian dari

aktualisasi nilai-nilai tersebut.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan mengeliminasi semangat dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kasus pembangunan di wilayah Kabupaten Berau, terlihat bahwa semangat dan nilai kebangsaan itu sendiri sebenarnya telah mengakar dalam diri pribadi anak bangsa, lewat budaya terbuka dengan pendatang, minimnya konflik sosial, hingga upaya pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa.

Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan agar nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada dapat semakin menjiwai, khususnya para pemangku kebijakan di daerah sehingga mampu mengarahkan pembangunan di wilayahnya secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

b. Saran

Berkaitan dengan kondisi di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain: pertama, diperlukan upaya untuk terus menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan kepada para pemimpin dan pemangku kebijakan di daerah melalui berbagai pelatihan dan pembekalan seperti P3DA agar mereka mampu menjiwai memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam pembangunan daerah.

Kedua, kemendagri perlu membimbing dan memberikan arahan agar pemda baik kabupaten/kota dan provinsi untuk dapat menyelesaikan berbagai sengketa wilayah perbatasan secara musyawarah dalam bingkai kekeluargaan sebagai bagian dari NKRI, dan mengeliminasi konflik.

Ketiga, pemda segera melakukan penertiban aset dengan melakukan



sertifikasi pada lahan-lahan yang dikuasai Pemda, agar bisa tercatat dan dimasukkan sebagai aset pemerintah daerah.

Endnotes:

1. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/11/01/bupati-berau-minta-kalimantan-utara-hormati-batas-wilayah> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.
2. <http://www.suarakutim.com/joko-ada-200-km2-batas-kutim-dan-berau-belum-selasai/> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.
3. <https://berau.prokal.co/read/news/61326-2021-batas-kampung-ditarget-tuntas.html> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.
4. <https://berau.prokal.co/read/news/62076-bahas-potensi-konflik-di-berau> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.
5. BPSRI. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Berau 2018. Data selengkapnya bisa dilihat di beraukab.bps.go.id.
6. <https://updateindonesia.com/berita-wagub-kaltim-inginkan-berau-jadi-kabupaten-percontohan-pembangunan-desa-614> diunduh pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.



DAFTAR PUSTAKA

Kerangka Acuan Esai Bidang Studi Negara Kesatuan Republik Indonesia, P3DA X, Lemhannas RI 2019.

BPS RI. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Berau 2018. Data selengkapnya bisa dilihat di beraukab.bps.go.id.

<https://www.tribunnews.com/regional/2013/11/01/bupati-berau-minta-kalimantan-utara-hormati-batas-wilayah> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<http://www.suarakutim.com/joko-ada-200-km2-batas-kutim-dan-berau-belum-selasai/> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://berau.prokal.co/read/news/61326-2021-batas-kampung-ditarget-tuntas.html> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://berau.prokal.co/read/news/62076-bahas-potensi-konflik-di-berau> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://updateindonesia.com/berita-wagub-kaltim-in-gin-kan-be-ra-u-ja-di-kabu-pa-ten-pe-rcon-toh-an-pembangunan-desa-614> diunduh pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://beritagar.id/artikel/berita/langkah-peduli-hutan-sudah-dimulai-di-berau> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://www.beritasa-tu.com/nasional/565230/lmb-bantu-naikkan-status-kampung-di-berau> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://tabloidsinartani.com/detail/industri-perdagangan/nasional/9704-Bangun-10-Kabupaten-Penyangga-Pangan-Ibu-Kota-Baru-di-Kaltim-Tanpa-Impor> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.